ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA TANJUNGPINANG

SKRIPSI

NITA SURYANI GULTOM
NIM : 13622172

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG
2019

ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA TANJUNGPINANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

Oleh

NITA SURYANI GULTOM

NIM : 13622172

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2019

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA TANJUNGPINANG

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh

Nama : Nita Suryani Gultom
NIM : 13622172

Menyetujui :

Pembimbing Pertama	Pembimbing Kedua
Ranti Utami, SE.,M.Si.,Ak.,CA	**Ayu Puspitasari, SE.,M.Si**
NIDN. 1004117701/Lektor	**NIDN. 102118802/Asisten Ahli**

Mengetahui
Ketua Program Studi

Sri Kurnia,SE.,Ak.,M.Si.,CA
NIDN. 1020037101/Lektor

Skripsi Berjudul

ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA TANJUNGPINANG

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Nama : Nita Suryani Gultom
NIM : 13622172

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal

Tiga Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Dan

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua

Ranti Utami, SE.,M.Si.,Ak.,CA
NIDN. 1004117701/Lektor

Sekretaris

Eka Kurnia Saputra.,ST.,MM
NIDN. 1011088902/Asisten Ahli

Anggota

Rachmad Chartady, SE.,M.Ak
NIDN. 1021039101/Asisten Ahli

Tanjungpinang, 13 Mei 2019

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan

Tanjungpinang

Ketua

Charly Marlinda,SE.,Ak.,M.Si.,CA
NIDN. 1029127801/Lektor

PERNYATAAN

Nama	:	Nita Suryani Gultom
NIM	:	13622172
Tahun Angkatan	:	2013
Indeks Prestasi Komulatif	:	3.04
Program Studi	:	Akuntansi
Judul Skripsi	:	Analisis Penyusunan Anggaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 13 Mei 2019

Penyusun,

NITA SURYANI GULTOM
NIM: 13622172

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini ku persembahkan kepada :

KEDUA ORANGTUAKU... AYAHANDA DALIAN GULTOM DAN IBUNDA ROHANA ARITONANG YANG SENANTIASA MENYEMANGATI HARI-HARIKU DALAM MENYELESAIKAN SKRIPSI INI.

HALAMAN MOTTO

"Duduk bersama orang yang beragama adalah sebuah kemulian dunia dan akhirat, dan bermusyawarah dengan orang berakal dan ahli nasehat adalah sebuah berkah, petunjuk dan taufik dari Allah. Jika ia menentukan sebuah solusi, maka janganlah menentangnya, karena hal itu akan mengundang kecelakaan bagimu" **(Hadits Iman Khazim a.s.)**

"Pendidikan bukanlah proses mengisi wadah yang kosong tetapi pendidikan adalah proses menyalakan api pikiran" **(W.B.Yeats)**

"DON'T BE AFRAID TO MOVE, BECAUSE THE DISTANCE OF 1000 MILES STARTS BY A SINGLE STEP."

(Jangan Takut Melangkah, Karena Jarak 1000 Mil Dimulai Dari Satu Langkah)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula peneliti kirimkan salam dan shalawat kepada junjungan kita semua, Rasulullah SAW dan seluruh sahabatnya. Penulisan skripsi yang berjudul "ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA TANJUNGPINANG", ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) jurusan Akuntansi pada program Studi Strata 1 (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Dalam penyusunan Skripsi ini peneliti menghadapi banyak kesulitan, namun peneliti mendapatkan dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Charly Marlinda SE.,M.,Ak., Ak.,CA A selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Wakil Ketua I dan III bidang akademik dan kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang sekaligus selaku dosen pembimbing I yang telah membantu membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan denga baik oleh penulis.
3. Ibu Ayu Puspitasari, SE.,M.Si selaku pembimbing II yang telah membantu membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan denga baik oleh penulis.
4. Ibu Sri Kurnia,SE.,Ak.,M.Si.,CA selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi yang senantiasa banyak membantu serta memberikan pengarahan dan saran guna menyelesaikan perkuliahan.

5. Bapak Hendy Satria, S.E.,M.Ak., selaku Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Bapak/Ibu Dosen Beserta Staf Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan ilmunya.
7. Kepala Kantor dan seluruh staf Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang khususnya staf Sub bagian Umum yang telah memberikan waktu dan kerjasama sehingga penelitian ini selesai seperti yang diharapkan
8. Keluarga dan sahabat, "*Kue Bawang*"… (Ina, Yusi, Nanda, Jasriani, Eka, Iqbal, dan Nofri) terima kasih atas doa dan dukungannya.
9. Teman - teman sekelas "Akuntansi Sore/2" dan teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun untuk melengkapi dan menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi yang telah disusun ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Tanjungpinang, 04 April 2019
Penulis

Nita Suryani Gultom
NIM: 13622172

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.5.1 Kegunaan Ilmiah	6
1.5.2 Kegunaan Praktis	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teori	8
2.1.1 Anggaran	8
2.1.2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan	16
2.1.3 Transparansi Penyusunan Anggaran	17
2.2 Kerangka Pemikiran	21
2.3 Penelitian Terdahulu	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Jenis Data	25
3.3 Teknik Pengumpulan Data	26
3.4 Teknis Analisis Data	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian 29
4.1.1 Sejarah Singkat BPBD Kota Tanjungpinang 29
4.1.2 Visi BPBD Kota Tanjungpinang..... 30
4.1.3 Misi BPBD Kota Tanjungpinang 30
4.1.4 Tujuan BPBD Kota Tanjungpinang 31
4.1.5 Tugas BPBD Kota Tanjungpinang 31
4.1.6 Struktur Organisasi BPBD Kota Tanjungpinang 32
4.1.7 Uraian Tugas BPBD Kota Tanjungpinang..... 35
4.2 Pembahasan 40
4.2.1 Proses Penyusunan Anggaran BPBD Kota Tanjungpinang..... 41
4.2.2 Faktor-Faktor Pertimbangan Dalam Menyusun Anggaran Pada BPBD Kota Tanjungpinang..... 45
4.2.3 Penyusunan Anggaran Sudah Sesuai Dengan Perda..... 46
4.2.4 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Selisih Anggaran 47
4.2.5 Laporan Keuangan BPB) Kota Tanjungpinang..... 48
4.2.6 Prinsip-Prinsip Transparansi Dalam Menyusun Anggaran 54

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan 58
5.2 Saran 60

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
CURICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Laporan Keuangan (BPBD) Kota Tanjungpinang 50

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 21
Gambar 4.1 Struktur BPBD Kota Tanjungpinang 34
Gambar 4.2 Alur Penyusunan Anggaran BPBD Kota Tanjungpinang 42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penunjukan Dosen Pembimbing

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Dari BPBD Kota Tanjungpinang

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

Lampiran 4. Hasil Wawancara

Lampiran 5. Dokumentasi

ABSTRAK

ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA TANJUNGPINANG

Nita Suryani Gultom. 13622172. Program Studi S1 Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. nitasuryani65@gmail.com

Kata Kunci: Anggaran

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyusunan anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang dan untuk mengetahui penyusunan anggaran apakah sudah sesuai dengan dengan Undang-Undang yang berlaku pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang.

Jenis data dalam penelitian ini data kualitatif yaitu data berupa keterangan teoritis, penjelasan, baik yang berasal dari Kepala dan staf yang berhubungan dengan penelitian ini. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data ordinal dan data sekunder yaitu data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan dengan baik oleh pihak lain. Metode pengumpulan data yang digunakan pertama observasi kedua wawancara dilakukan dengan Kepala, dan Staff pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang yang ketiga dokumentasi.

Berdasarkan penelitian tentang Analisis Penyusunan Anggaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang, maka diperoleh hasil dalam penelitian ini yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang melakukan rapat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau untuk membahas rencana-rencana pelaksanaan penyusunan anggaran mulai dari jadwal pelaksanaan, materi yang disampaikan, dan prosedur dalam penyusunan anggaran tersebut. Dalam penyusunan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang sudah sesuai dengan perda yang berlaku hal ini dapat kita lihat Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 65 Ayat 1.

Dalam penyusunan anggaran diharapkan BPBD Kota Tanjungpinang harus mengacu kepada Undang- undang/Perda yang berlaku.

Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
April 2019 (60 Halaman + 1 Tabel + 3 Gambar + 5 Lampiran)
Referensi : 18 Buku + 3 Jurnal

Dosen Pembimbing 1 : Ranti Utami, SE.,M.Si.,Ak.,CA
Dosen Pembimbing 2 : Ayu Puspitasari, SE.,M.Si

ABSTRACT

ANALYSIS OF BUDGET DEVELOPMENT IN REGIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCY (BPBD) TANJUNGPINANG CITY

Nita Suryani Gultom. 13622172. Program Study S1 Accounting. College of Economics (STIE) Development Tanjungpinang. nitasuryani65@gmail.com

Keywords: Budget

The purpose of this study was to find out the budgeting process at the Regional Disaster Management Agency Tanjungpinang City and to find out whether the budgeting was in accordance with the applicable Laws at the Regional Disaster Management Agency Tanjungpinang City.

The type of data in this study is qualitative data, namely data in the form of theoretical information, explanations, both from the Head and staff related to this study. The type of data used is primary and secondary data. Primary data is data obtained by field surveys that use all methods of ordinal data collection and secondary data, namely data that has been further processed and presented properly by other parties. The data collection method used was the first two observations of interviews conducted with the Head, and Staff at the Regional Disaster Management Agency in Tanjungpinang City, the third was documentation.

Based on research on the Analysis Of Budget Development In Regional Disaster Management Agency (BPBD) Tanjungpinang City, the results obtained in this study were the Disaster Management Agency (BPBD) Tanjungpinang City held a coordination meeting with the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Riau Islands Province to discuss budget implementation plan starting from the implementation schedule, material delivered, and procedures in preparing the budget. In preparing the budget for the Disaster Management Agency (BPBD) Tanjungpinang City in accordance with the applicable regulations this can be seen based on Tanjungpinang City Regional Regulation Number 3 of 2016 concerning Disaster Management Implementation Article 65 Paragraph 1.

In preparing the budget, it is expected that the city of Tanjungpinang must refer to the applicable law/regulation.

College of Economics (STIE) Development Tanjungpinang
April 2019 (60 Pages + 1 Tables + 3 Pictures + 5 Appendix)
References : 18 Books + 3 Journals

Advisor 1 : Ranti Utami, SE.,M.Si.,Ak.,CA
Advisor 2 : Ayu Puspitasari, SE.,M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Jerry Galaento (2014) pemerintah yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan good governance diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralisasi, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Indonesia mengalami reformasi yang mengaki-batkan adanya otonomi daerah sebagai bentuk dari tanggung jawab masing-masing daerah dalam mengurus daerahnya tanpa lepas dari kendali pemerintah pusat. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik didaerah masing-masing.

Menurut Jerry Galaento (2014) seiring dengan upaya mewujudkan *good governance* maka terjadilah reformasi atas pengelolaan keuangan. Sebelum berlakunya paket undang-undang di bidang keuangan negara, ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengharuskan pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan negara dalam bentuk perhitungan anggaran negara/daerah. Wujud laporan ini hanya menginformasi aliran kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan format anggaran yang disahkan oleh legislatif, tanpa menyertakan informasi tentang posisi kekayaan dan kewajiban pemerintah.

Perwujudan *good governance* memerlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. Terjadi banyak perubahan dan pembaharuan manajemen keuangan daerah di era otonomi, ditandai dengan perubahan yang sangat mendasar, mulai dari sistem penganggaran, perbendaharaan, sampai pada pertanggungjawaban laporan keuangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang berlandaskan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 65 Ayat 1 bahwa penyusunan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana pada

tahap prabencana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengelolaan keuangan Daerah.

Menurut Hansen dan Mowen (2009) anggaran memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan, menyediakan standar evaluasi kinerja, memperbaiki komunikasi dan koordinasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan aktivitasnya, memerlukan suatu sistem operasional kegiatan guna terlaksananya program kerja tersebut. Berbagai jenis sistem penunjang program kerja, salah satunya adalah penyusunan anggaran. Apabila prosedur penyusunan anggaran dilakukan secara baik maka akan memperlancar kinerja organisasi, oleh sebab itu diperlukan sistem yang baik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjung pinang memang banyak, mulai dari sosialisasi pencegahan bencana, informasi tanggap bencana, kesiapsiagaan penyelamatan, sampai pada rehabilitasi serta rekontruksi kawasan pasca bencana yang semuanya bertujuan sebagai pengurangan resiko bencana serta mengedepankan pelayan publik yang lebih memproritaskan masyarakat. Hal ini dikarenakan, untuk menciptakan terlaksananya visi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang, yaitu **"Tanjungpinang Yang Tangguh Dalam Menghadapi Penanggulangan Bencana"**. Pegawai Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanjungpinang dalam melaksanakan pekerjaan belum dikatakan

efektif karena hasil pekerjaan dan pencapaian kinerja yang belum maksimal. Peneliti mendapati beberapa fenomena yang berhubungan dengan Penyusunan Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun beberapa fenomena yang terjadi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanjungpinang, antara lain :

1. Tingkat pencapaian target dan tujuan pegawai belum tercapai, hal ini dapat dilihat dari laporan akuntabilitas kinerja pegawai dalam pencapaian indikator kinerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanjungpinang pada tahun 2018 yakni salah satunya adalah pegawai dengan starata pendidikan sarjana belum mampu menggunakan komputer secara optimal.
2. Kurangnya komunikasi yang baik antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau dari rencana dalam penyusunan anggaran baik dari jadwal penyusunan anggaran dan materi yang disampaikan.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang belum 100% mengacu pada Musrenbag dan RPJMD dalam penyusunan anggaran (sumber : wawancara, 16 Juli 2018, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanjungpinang).

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini secara mendalam dengan judul **"Analisis Penyusunan Anggaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjung pinang".**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyusunan anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang?
2. Apakah penyusunan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk menganalisis proses penyusunan anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang.
2. Untuk menganalisis penyusunan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang apakah sudah sesuai dengan dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Ilmiah

Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian pada Jurusan Akuntansi di Sekolah Ilmu Ekonomi (STIE) Pembagunan Tanjungpinang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan terhadap realita yang terjadi di dalam pemerintah yang nantinya berguna bagi kemajuan khususnya penyusunan anggaran.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintahan, yaitu sebagai bahan pertimbangan untuk membuat perencanaan dan kebijaksanaan yang tepat untuk masa yang akan datang.

3. Bagi Kampus

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai penyusunan anggaran yang dalam hal ini adalah analisis penyusunan anggaran.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat hampir seluruh isi rancangan penelitian yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini mahasiswa menguraikan tentang teori yang dipakai atau materi materi yang berkaitan dengan isi pokok pembahasan skripsi.

Bab III Metode Penelitian

Berisi tentang tentang pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian, data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan, pengolahan dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan memuat hasil penelitian secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat.

Bab V Penutup

Bagian bab ini menjelaskan tentang Kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Anggaran

1. Pengertian Anggaran

Menurut Rudianto (2009) anggaran merupakan suatu alat bagi manajemen dalam melakukan perencanaan dan pengendalian terhadap perusahaan. Anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal dan sistematis. Kegiatan operasional perusahaan yang dijalankan pihak manajemen membutuhkan suatu alat yang dapat dijadikan sebagai pedoman, dimana hal ini dimaksudkan agar tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai. Salah satu alat yang dapat digunakan oleh pihak manajemen untuk menjalankan kegiatan-kegiatan operasional perusahaan adalah anggaran atau disebut juga *budget.* Menurut Hansen dan Mowen (2012), Anggaran merupakan rencana keuangan untuk masa depan rencana tersebut mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Menurut Mardiasmo (2009) anggaran merupakan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Menurut Halim (2009) anggaran adalah rencana dalam bentuk pengkuantifikasian, biasanya dalam unit moniter, untuk kurun waktu tertentu. Menurut Anthony, R. N dan Govindarajan (2009) anggaran merupakan alat yang penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam

organisasi. Menurut Samryn, (2012) anggaran merupakan pernyataan kuantitatif dalam unit moneter tentang suatu rencana kegiatan yang sekaligus berfungsi sebagai alat bantu untuk mengkoordinasikan implementasi rencana tersebut.

Menurut Venkatasami (2015) anggaran adalah rencana yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya istilah moneter, mencakup jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Menurut Joshua *et al.*, (2013) anggaran adalah alat untuk mencapai tujuan dan, bukan tujuan itu sendiri karena digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan perusahaan. Ini adalah rencana jangka pendek yang menggambarkan fokus tujuan jangka panjang organisasi. Menurut Munandar (2010) *business budget* (Anggaran Perusahaan) atau *budget* (Anggaran) adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam satuan keuangan (unit moneter) dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang.

Dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah alat akuntansi yang umum digunakan perusahaan untuk merencanakan dan mengawasi hal-hal yang harus dilakukan untuk memuaskan pelanggan dan memperoleh sukses di pasar. Anggaran memberikan ukuran atas hasil-hasil keuangan yang diharapkan perusahaan-perusahaan dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Dengan membuat rencana untuk masa depan, manager lebih baik memfokuskan pikirannya untuk mencari peluang-peluang yang tersedia saat ini ingatlah bahwa sebagian kecil perencanaan bisnis mengalami kegagalan, tetapi kebanyakan yang gagal adalah gagal merencanakan.

Jadi, menurut penulis penganggaran perusahaan adalah proses penyusunan anggaran yang dimulai dalam penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang perlu, pembagian tugas, serta pelaksanaan rencana tersebut pada akhirnya, tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil pelaksanaan rencana itu.

2. Karakteristik Anggaran

Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek bagi suatu organisasi. Menurut Halim (2009) anggaran operasi biasanya meliputi satu tahun dan menyatakan rencana pendapatan anggaran mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a. Anggaran mengestimasi tingkat laba potensial dari suatu unit usaha.
b. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan, walaupun satuan keuangan tersebut dibantu dengan data non keuangan (misalnya jumlah unit yang dijual atau diproduksi).
c. Anggaran umumnya meliputi periode satu tahun.

Menurut Sunanto (2016) karakteristik anggaran sebagai berikut:

a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.
b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun.
c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yng ditetapkan dalam anggaran.
d. Usulan anggaran di *review* dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.

e. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah di bawah kondisi tertentu.

f. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.

3. Jenis Anggaran

Menurut Nafarin (2009) anggaran dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, sebagai berikut:

a. Segi dasar penyusunan

b. Segi cara penyusunan

c. Segi jangka waktu

d. Segi bidang

e. Kemampuan menyusun

f. Segi fungsi

g. Segi metode penentuan harga pokok produk.

4. Manfaat-Manfaat Anggaran

Menurut Hansen dan Mowen (2012) sistem penganggaran memberikan beberapa manfaat untuk suatu organisasi sebagai berikut :

a. Memaksa para manager untuk melakukan perencanaan

b. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan

c. Menyediakan standar evaluasi kinerja

d. Memperbaiki komunikasi dan koordinasi.

5. Fungsi Anggaran

Menurut Rudianto (2009) fungsi anggaran adalah:

a. Alat perencanaan

Sebagai bagian dari fungsi perencanaan *(planning)* anggaran merupakan rencana kerja yang menjadi pedoman anggota organisasi dalam bertindak. Anggaran merupakan rencana yang diupayakan untuk direalisasikan. Anggaran memberikan sasaran dan arah yang harus dicapai oleh setiap bagian organisasi didalam suatu periode waktu tertentu. Tanpa memiliki anggaran, perusahaan tidak memiliki arah dan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Fungsi perencanaan, anggaran memiliki beberapa manfaat yang saling terkait dengan lainnya, yaitu:

1) Memberikan pendekatan yang terarah dan terintegrasi kepada seluruh anggota organisasi.
2) Menciptakan suasana organisasi yang mengarah kepada tujuan umum, yaitu pencapaian laba usaha.
3) Mendorong seluruh anggota organisasi untuk memiliki komitmen mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
4) Mengarahkan penggunaan seluruh sumber daya pada kegiatan yang paling menguntungkan.
5) Mendorong pencapaian standar prestasi yang tinggi bagi seluruh anggota organisasi.

b. Alat Pengendalian

Anggaran berguna sebagai alat penilai apakah aktivitas setiap bagian organisasi telah sesuai dengan rencana atau tidak. Dalam hal ini anggaran berfungsi sebagai suatu standar atau tolak ukur manajemen telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau tidak. Jika realisasi pelaksanaan setiap bagian manajemen lebih baik dari anggaran, maka dapat dinilai bahwa bagian tersebut telah berhasil mencapai rencana yang ditetapkan. Fungsi pengendalian, anggaran memiliki beberapa manfaat yang saling terkait satu dengan lainnya, yaitu:

1) Berperan sebagai tolak ukur atau standar bagi kegiatan organisasi.
2) Memberikan kesempatan untuk menilai dan mengevaluasi secara sistematis setiap segi atau setiap aspek organisasi.
3) Mendorong pihak manajemen secara dini mengadakan penelaahan terhadap masalah yang dihadapi.

6. Analisis *Varians* (Selisih) Anggaran

Menurut Rainborn Cecily A dan Kinney Michaer R (2011) analisis anggaran *(budget variance)* sama dengan total *overhead* aktual dikurangi overhead yang dianggarkan untuk output aktual suatu periode. *Varian* atau selisih adalah perbedaan antara suatu rencana atau target dan suatu hasil. *Varian* memberikan indikasi atau suatu peringatan bahwa operasi tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan yang intinya adalah situasi ideal yang hendak dicapai. Biaya standar dibandingkan dengan biaya aktual melahirkan

penyimpangan *(varian)*. Jika biaya standar lebih besar dari pada biaya aktual, maka melahirkan *varian* yang menguntungkan (*favorable variance*) dan sebaliknya jika biaya standar lebih kecil dari pada biaya aktual, maka melahirkan *varian* yang tidak menguntungkan (*unfavorable variance*).

7. Tahap-tahap Analisis Anggaran

Proses penyusunan anggaran pada umumnya disesuaikan dengan peraturan yang ada disuatu pemerintah daerah. Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang berlandaskan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasal 16 bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, evaluasi kegiatan dan rencana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
b. Penyusunan program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi kegiatan penyusunan rencana anggaran, pengelolan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 65 Ayat 1 bahwa penyusunan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengelolaan keuangan Daerah.

Menurut Rainborn Cecily A dan Kinney Michaer R (2011) tahap-tahap analisis anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Siapkan data-data anggaran dan laporan realisasi anggaran.

b. Data utama yang digunakan dalam analisis ini adalah anggaran (APBD) dan laporan realisasi anggaran. Data anggaran memuat rencana-rencana penerimaan pendapatan, pengeluaran belanja dan pembiayaan dalam satu periode. Data laporan realisasi anggaran memuat realisasi penerimaan pendapatan, pengeluaran belanja dan pembiayaan dalam satu periode. Pastikan item-item dalam laporan realisasi anggaran sama dengan item-item pada rencana anggaran.

c. Bandingkan data-data realisasi anggaran dengan anggaran- nya untuk setiap item yang sama.

d. Item anggaran dibandingkan dengan item realisasi baik pada pos pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Untuk memperoleh hasil yang objektif dan akuntabel, laporan realisasi anggaran harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan memadai.

e. Hitung selisih anggaran.

f. Pembandingan anggaran dengan realisasinya menghasilkan selisih atau penyimpangan *(variance)*. Selisih ini dikelompok- kan menjadi dua yaitu selisih penerimaan dan selisih pengeluaran sehingga dapat diketahui selisih lebih *(surplus)* atau selisih kurang *(defisit)* anggaran.

g. Hitung persentase tingkat ketercapaian anggaran.

h. Nilai selisih anggaran yang terjadi dapat dihitung persentase ketercapaia nnya. Penghitungan persentase ketercapaian ini dilakukan pada pos-pos penerimaan maupun pengeluran.

i. Lakukan *analytical procedure* dengan pembuatan rasio-rasio kinerja.

j. Untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang kinerja organisasi, maka analisis bisa diteruskan dengan melakukan penghitungan rasio-rasio anggaran.

2.1.2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan

Menurut Krismiaji (2010) pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen.

Menurut Mahmudi (2011) sistem pengendalian internal merupakan suatu proses pengendalian yang melekat pada tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh karyawan yang dilakukan bukan hanya bersifat *incidental* dan *responsive* atas kasus tertentu saja tetapi bersifat terus-menerus. Sistem pengendalian internal memberikan jaminan yang memadai, bukan jaminan absolut, karena sangat sulit dan mahal untuk membangun sistem yang sempurna. Di samping itu, sistem pengendalian internal itu sendiri masih mengandung kelemahan dan keterbatasan sehingga masih memungkinkan untuk diterobos, dilanggar, dan dilakukan kesalahan.Sistem pengendalian bukanlah sesuatu yang

final, tetapi harus selalu dievaluasi, diuji, dikembangkan dan diperbaiki. Sistem pengendalian internal memilik tiga fungsi utama yaitu:

1. Pengendalian preventif
2. Pengendalian detektif
3. Pengendalian Korektif

2.1.3 Transparansi Penyusunan Anggaran

1. Pengertian Transparansi

Menurut Tahir (2011) transparansi merupakan nilai utama dari sistem pemerintahan. Konteks utama aktivitas pemerintah harus diyakini berdasarkan pada transparansi. Terdapat kekuatan publik yang menuntut transparansi yang lebih besar. Pada hakekat nya dengan percepatan dan pengaruh terhadap organisasi swasta, sebagaimana terus meningkatnya pepulasi masyarakat. Ini berarti tuntutan publik terhadap transparansi sudah semakin kuat. Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemrintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

Menurut Mardiasmo (2009) transparansi adalah sebagai penyediaan informasi tentang pemeritahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta menjamin akses bagi setiap orang atau masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut. Transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

Menurut Agoes (2009) transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam penyampaian harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak ada hal-hal yang disembunyikan, ditutup-tutupi, dan ditunda-tunda pengungkapannya. Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta menjamin akses bagi setiap orang atau masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut.

2. Prinsip-Prinsip Transparansi

Menurut Tahir (2011) prinsip-prinsip transparansi yaitu :

a. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
b. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
c. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
d. Laporan tahunan.
e. Website atau media publikasi organisasi dan pedoman dalam penyebaran informasi

Prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut :

a. Keterbukaaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
b. Keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
c. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rancana).
d. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah).
e. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Aspek mekanisme pengelolaan anggaran harus dilakukan secara transparansi, ada hal-hal yang perlu diketahui yaitu :

a. Penetapan posisi jabatan
b. Kekayaan pejabat publik
c. Pemberian penghargaan
d. Kesehatan
e. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik.

3. Proses Transparansi

Transparansi merupakan nilai utama dari sistem pemerintahan. Konteks utama aktivitas pemerintah harus diyakini berdasarkan pada transparansi. Terdapat kekuatan publik yang menuntut transparansi yang lebih besar. Pada hakekat nya dengan percepatan dan pengaruh terhadap organisasi swasta, sebagaimana terus meningkatnya pepulasi masyarakat. Ini berarti tuntutan publik terhadap transparansi sudah semakin kuat. Menurut Tahir (2011) proses transparansi meliputi :

a. *Standard procedural requirements* (Persyaratan Standar Prosedur), bahwa proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
b. *Consultation processes* (Proses Konsultasi), Adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat.

c. *Appeal rights* (Permohonan Izin), adalah pelindung utama dalam proses pengaturan. Standard dan tidak berbelit, transparan guna menghindari adanya korupsi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini menjelaskan penyusunan anggaran. Agar penelitian ini mudah dipahami maka digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Konsep yang disesuaikan untuk penelitian 2019

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis penyusunan anggaran menunjukkan hasil seperti berikut:

1. Ramla Basri (2013) judul penelitian "Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara". Hasil bahwa proses penyusunan anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Kotamobagu telah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan No.22 Tahun 2011. Realisasi Anggaran Tahun 2012 sebesar 95,30 %.

2. Judisty Kaumbang (2014) judul penelitian "Analisis Penyusunan Anggaran Pada Kantor Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado Tahun Anggaran 2014". Hasil penelitian menunjukan Kantor Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado dalam pelaksanaan penyusunan anggaran tahun anggaran 2014 telah sesuai dengan Permendagri No.27 Tahun 2013. Pelaksanaan penyusunan anggaran Kantor Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manadotahun anggaran 2014 meliputi penyusunan RKPD, KUA/PPAS hingga RKA SKPD dengan baik.
3. Sulistio (2010) judul penelitian "Proses Penyusunan Anggaran Kinerja (Studi pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan)". Hasil penelitian Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah melaksanakan penyusunan anggaran daerah berbasis kinerja sebagai upaya pembiayaan program-program pembangunan daerah. Penyusunan anggaran berbasis kinerja ini mendapatkan dukungan politik yang tinggi dari Kepala Daerah maupun legislatif daerah (DPRD).
4. Riska Korompot (2015) judul penelitian "Analisis Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014". Hasil penelitian diperoleh DPPKAD

kota kotamobagu telah melaksanakan proses penyusunan anggaran sesuai dengan Permendagri No. 27 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2014, namun belum merampungkan proses penyusunan APBD dalam Siklus Anggaran Daerah tetapi masih dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP).

5. Okpanachi Joshua (2013) judul penelitian "*Budget Target Setting and Effective Performance Measurement in Nigerian Hospitality Industry*". Hasil penelitian diperoleh bahwa prosedur penetapan target anggaran di industri perhotelan di negara bagian Kaduna tidak diartikulasikan dengan baik dan fokus sedangkan penetapan target anggaran adalah alat yang efektif untuk evaluasi kinerja yang efektif dari individu dan unit dalam industri perhotelan. Oleh karena itu, direkomendasikan bahwa manajemen hotel harus melakukan upaya yang diperlukan untuk memperkuat proses perumusan anggaran mereka, yaitu penetapan target untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan yang dapat dicapai.
6. Amala V Venkatasami (2015) judul penelitian "*A Study on Budgetary Control with Special Reference to Coimbatore District Co-Operative Milk Producer's Union Limited, Coimbatore*". Hasil penelitian diperoleh Manajemen anggaran menikmati peran penting dalam organisasi. Peran manajemen dana adalah itu esensi bisnis. Manajemen memainkan peran yang persis sama dalam organisasi. Sistem memastikan bahwa gelar associate berlaku informasi dikumpulkan dari berbagai sumber. Diproses dan dikirim lebih banyak ke semua atau tujuan yang melarat. Sistem ini

diprediksi memenuhi data keinginan pribadi, sekelompok individu, sekelompok pejabat ekonomi, para manajer dan karenanya manajemen tinggi bahwa pengelolaan dana sangat diperlukan dalam mode organisasi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013) metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada *filsafat postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami. *Filsafat Postpositivisme* merupakan suatu aliran yang memperbaiki kelemahan-kelemahan positivisme yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

Menurut Umar (2013) metode penelitian kualitatif menggunakan data yang bukan dalam bentuk skala yang lebih rendah, yaitu skala nominal, ordinal, ataupun interval dengan kesemuanya dapat dikategorikan, sehingga jelas apa yang akan disamakan dan dibedakan dari apa yang akan diperbandingkan dalam rangka menjawab semua permasalahan yang telah dirumuskan dalam riset karena memang inilah bagian terpenting dari riset jenis ini. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis penyusunan anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang.

3.2 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Menurut Kuncoro (2009) data primer yaitu data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data

ordinal. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah hasil wawancara berupa tanya jawab langsung dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang, Kepala Pelaksana dan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang tentang penyusunan anggaran.

2. Menurut Kuncoro (2009) data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan dengan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini antara lain :

a. Sejarah singkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang.
b. Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang.
c. Penyusunan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2010) adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal yang diamati.

2. Wawancara

Metode ini biasanya diistilahkan dengan wawancara bebas, ini dimaksudkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak didasarkan pada sejumlah pertanyaan yang telah disusun sebelumnya baik itu dalam bentuk terbuka maupun dalam bentuk tertutup. Peneliti dalam hal ini melakukan wawancara bebas dengan informan yaitu Bapak Drs. Riono, M.Si selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang, Bapak Djafnurinsyah, SE selaku Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang dan Ibu Wenny Dawati, S.Sos selaku Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi *(Documentation Method)* adalah suatu sarana yang digunakan penulis untuk penyediaan berbagai macam informasi melalui media masa dalam melengkapi proses penyusunan skripsi ini.

3.4 Teknik Analisis Data

Menurut Singgih Santoso (2014) teknik analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis *time series* yaitu analisis data berbasis waktu ditandai dengan adanya interval waktu tertentu dan bukan hanya satu titik waktu.

Teknik analisis data dilakukan dengan menganalisis perbandingan antara teori dari berbagai referensi dan praktek lapangan. Teori-teori yang relevan

dipakai sebagai pembanding dengan praktek yang dilakukan dalam objek penelitian. Analisa data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara Menganalisa proses penyusunan anggaran tahun 2018 yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang dan menganalisis penyusunan anggaran apakah sudah sesuai dengan dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, S dan I Cenik A. 2009. *Etika Bisnis Dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat.

Anthony, R. N dan Govindarajan, V. 2009. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jilid 2. Jakarta: Salemba Empat.

Halim. 2009. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Hansen dan Mowen. 2009. *Akuntansi Manajerial*. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.

Jerry Galaento. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Milik Negara Yang Go Public Tahun 2008-2012*. 2(4): 491–502.

Krismiaji. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. Cetakan Ke. Yogyakarta: UPP AMD YKPN.

Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Edisi 3. Jakarta: Erlangga.

Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Badan Penerbit UUI Press.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Munandar. 2010. *Budgetin Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. Yogyakarta: BPFE-UGM.

Nafarin, M. 2009. *Penganggaran Perusahaan.* Edisi ke-3. Jakarta: Salemba Empat.

Okpanachi Joshua, and Nma Ahmed Mohammed. 2013. *Budget Target Setting and Effective Performance Measurement in Nigerian Hospitality Industry*.1(3): 39–50.

Rainborn Cecily A dan Kinney Michaer R. 2011. *Akuntansi Biaya*. Edisi Ketujuh. Jakarta: Salemba Empat.

Rudianto. 2009. *Penganggaran*. Jakarta: Erlangga.

Samryn, L. M. 2012. *Akuntansi Manajemen. (Informasi Biaya Untuk Mengendalikan Aktivitas Oprasi Dan Infestasi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Singgih Santoso. 2014. *Statistik Parametik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sugiyono. 2013. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

Sunanto. 2016. "*Keuangan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin. Prodi Akuntansi Politeknik Sekayu.*" IV(1): 1–11.

Tahir, A. 2011. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.

Umar. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Venkatasami, Amala V. 2015. *"A Study on Budgetary Control with Special Reference to Coimbatore District Co-Operative Milk Producer Union Limited, Coimbatore."* Journal of Business & Financial Affairs 4(2).

CURICULUM VITAE

Nama Lengkap	: NITA SURYANI GULTOM
Tempat/Tanggal Lahir	: Tanjungpinang, 03 Oktober 1995
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Perempuan
Status	: Belum Menikah
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Alamat	: Kp. Bangun Rejo Gang Kamboja No. 114 Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur
No Telp/HP	: 085834638615
Email	: nitasuryani65@gmail.com
Nama Orangtua	: Dalian Gultom (Ayah) dan Rohana Aritonang (Ibu)
Riwayat Pendidikan Formal	: SD Negeri 006 Tanjungpinang Tahun 2007 SMP Negeri 12 Tanjungpinang Tahun 2010 SMK Pariwisata Engku Kelana Tanjungpinang Tahun 2013 STIE Pembangunan Tanjungpinang Tahun 2019

Tanjungpinang, 4 April 2019

Nita Suryani Gultom
NIM: 13622172